



RENCANA KERJA TAHUN 2022

KECAMATAN TELLU LIMPOE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG





**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KECAMATAN TELLU LIMPOE**

Jl. BAU MASSEPE NO. 74 AMPARITA TELEPON 3582544 KODE POS 91671

**KEPUTUSAN CAMAT TELLU LIMPOE
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 13 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2022
KECAMATAN TELLU LIMPOE
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

Camat Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang;

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun Dokumen Rencana Kerja Tahun 2021 Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2021

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi ;
2. Undang – undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
6. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD
7. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
9. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 13 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005 – 2025

9. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan
10. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tellu Limpoe tahun 2019 – 2023

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Rencana Kerja Tahun 2021 dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum pada lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah Melakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan bila ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan dirubah sebagaimana mestinya

Di tetapkan di Amparita
pada tanggal, 3 Mei 2021

**CAMAT TELLU LIMPOE
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**



ANZI MAURAGA, S.IP

NIP. 19661231198603 1 064

Tembusan :

1. Bupati Sidenreng Rappang, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang
3. Inspektur Kabupaten Sidenreng Rappang
4. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang
5. Pertinggal.-

Lampiran : Keputusan Camat Tellu Limpoe No. Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2022 Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng, tanggal 3 Mei 2021.

Susunan Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2022 Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang

No	Nama	Jabatan Dalam Tim
1	Andi Mauraga, S.IP	Pengarah
2	Asbudi, S.IP	Ketua
3	Ai Versiatny Kholida, S.A.B	Sekretaris
4	Baharuddin	Anggota
5	Andi Nanni, S.E	Anggota
6	Dra. Y. Kommihani	Anggota
7	Muh. Ridwan, S.E, Amd, Pemb	Anggota
8	Junaidi, S.E	Anggota
9	Darmiah, S.IP	Anggota Tim Sekretaris
10	Muhammad Rusli	Anggota Tim Sekretaris
11	Fatmawati, SH	Anggota Tim Sekretaris

CAMAT TELLU LIMPOE
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ANDI MAURAGA, S.IP
NIP. 19661231198603 1 064



RENCANA KERJA TAHUN 2022

**KECAMATAN TELLU LIMPOE
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan hidayahNYA kepada kita semua, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2022 Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap dapat terlaksana secara tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tellu Limpoe memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan mencakup segala bidang, sehingga perbaikan disegala bidang merupakan kondisi yang diinginkan utamanya pada hal-hal yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang kondisinya saat ini belum berada pada suatu kondisi yang ideal diinginkan baik oleh pemerintah terlebih oleh masyarakat. Begitupula dengan proyeksi kedepan. Harapan yang diinginkan merupakan harapan seluruh elemen masyarakat yang merupakan cita-cita ideal dari masyarakat yang tentunya berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 adalah merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, kebijakan dan Perogram Strategis Kabupaten Sidenreng Rappang. Yang selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Kerja Anggaran.

Kami menyadari bahwa dalam penulisan Renja Kecamatan Tellu Limpoe masih memerlukan kesempurnaan dimasa yang akan datang seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi di lapangan. Oleh karena itu saran dan masukan dari semua pihak terhadap renja ini akan semakin memperkaya khasanah dalam penyempurnaan kebijakan, strategi dan program yang lebih strategis, berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Amparita, Juli 2021



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA Perangkat Daerah	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	25
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	27
2.4. Review terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah	28
3.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	35
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN	
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	37
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah	37
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	40
4.2. Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	47
BAB V. PENUTUP	51
LAMPIRAN	52

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel TC. 29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan dan Pencapaian Renstra Kabupaten Sidenreng Rappang	11
Tabel TC. 30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang	26
Tabel TC. 31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Kabupaten Sidenreng Rappang	29
Tabel TC. 32 Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2022	36
Tabel TC. 33 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023	41
Tabel 1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang	39
Tabel 2. Indikator Program dan Kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang	47
Tabel 3. Formulasi Pengukuran Indikator Sasaran/Kinerja Program (Outcome) Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Perencanaan pembangunan, dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Pembangunan merupakan proses yang berjalan secara stimulan yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan arah dan tindakan yang diharapkan di masa depan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya. Pelaksanaan merupakan aktualisasi dari perencanaan yang telah ditetapkan, sedangkan pengendalian merupakan proses pengarahan kegiatan agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sedangkan evaluasi merupakan aktifitas menilai hasil yang terjadi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan bersama. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, Kecamatan Tellu Limpoe mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagaimana diharapkan semua pihak. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tadi, secara fungsional Kecamatan Tellu Limpoe dituntut untuk mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) yang berlaku selama 5 (lima) tahun maupun Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang berlaku 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan yang disusun dan dirumuskan setiap tahun. Perencanaan Kerja ini menggambarkan tujuan, sasaran, cara pencapaian tujuan sasaran yang meliputi

kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dan mempertimbangkan usulan masyarakat. Perencanaan kerja tahunan menentukan diarahkan kemana suatu organisasi untuk tahun kedepan, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidak berhasilannya. Adapun cakupan perencanaan kerja tahunan meliputi tujuan, dan sasaran, metodologi, analisis situasi, tujuan objektivitas dan target.

Maka dalam proses penyusunannya tentu memperhatikan semua aspek perencanaan pembangunan. Renja Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 ini merupakan hasil proses politik, yakni bermula dari rumusan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, tetapi dalam proses penyusunannya dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur pelaku pembangunan dan memasukkan pula segenap komponen perencanaan teknokratik yakni program dan kegiatan Kecamatan Tellu Limpoe. Sejalan dengan itu, muatan Renja Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 ini juga memperhatikan pula arahan kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang. Oleh karena itu matriks rencana program dan kegiatan pembangunan tahunan yang diuraikan dalam dokumen perencanaan ini telah disusun secara integratif dan komprehensif yang nantinya dijabarkan dalam RKA (rencana kerja anggaran) Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang selama satu tahun anggaran.

1.2 Landasan Hukum

Renja Kecamatan Tellu Limpoe tahun 2022 disusun berdasarkan hasil analisa untuk mendukung pencapaian kinerja aparatur di lingkup Pemerintah Kecamatan Tellu Limpoe dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tellu Limpoe dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar acuannya.

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004, Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007, Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008, Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara

Republik Indonesia tahun 2007, Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4693);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008, Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008, Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4833);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010, Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5103);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016, Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5887);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016, Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5941);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017, Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6133);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018, Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6322);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 199);

21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017, Nomor 136);
22. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2009 tentang tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 310);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 927);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 1312);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 1955);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 461);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 1538);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018, Nomor 1540);
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 1541);
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 1619);
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 157);
 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 37. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 310);
 38. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi selatan Nomor 10 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dearah (RPJPD Propinsi Sulawsesi Selatan Tahun 2008-2028) (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015, Nomor 7);
 39. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan Daerah;

40. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Prov. Sulsel Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Prov. Sulsel Nomor 301);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2025 (Lembaran Daerah Sidenreng Rappang Tahun 2007, Nomor 26);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) (Lembaran Daerah Tahun Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012, Nomor 26);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Perencanaan Daerah;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019, Nomor 5);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021, Nomor 71);
46. Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tellu Limpoe tahun 2018 – 2023

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang adalah untuk menjabarkan Perubahan Renstra Kecamatan Tellu Limpoe tahun 2018 – 2023 yang merupakan perencanaan satu periode (5 tahun) ke dalam perencanaan yang sifatnya tahunan (1 tahun).

Tujuan penyusunan Renja Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang adalah :

- Menyiapkan Acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Tellu Limpoe;
- Menyiapkan kerangka evaluasi kinerja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Secara sistematis Renja Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

- BAB I. PENDAHULUAN terdiri atas beberapa bagian yaitu latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan
- BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU terdiri atas beberapa bagian yaitu Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN terdiri atas beberapa bagian yaitu Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Tellu Limpoe
- BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH terdiri atas beberapa bagian yaitu Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, dan Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.
- BAB IV. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA Perangkat Daerah

Rencana Kerja merupakan program kerja kegiatan Perangkat Daerah yang dilaksanakan setiap tahunnya dan menjadi bagian dari Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun 2020 dan Pencapaian Rencana Strategis (Renstra) sampai dengan tahun 2021 yang telah dilaksanakan, dapat kita lihat pada uraian sebagai berikut :

1. Program Pelayanan administrasi Perkantoran yang mencakup kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, kegiatan penyediaan jasa jaminan Barang Milik Daerah, kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan, kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor, kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor, kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah, kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah, dan kegiatan pelayanan administrasi perkantoran telah mencapai tingkat realisasi target Renja 100% dan Capaian target Renstra (periode 2019-2023) sampai tahun 2021 diperkirakan telah mencapai 60%.

Walaupun dalam proses pelaksanaan kegiatan hingga penyelesaian pertanggung jawabannya masih kadang menemui kendala berupa lambatnya proses pencairan dana, namun semua bisa diatasi dengan ketekunan penanggung jawab kegiatan dan pengelola keuangan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang mencakup kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, kegiatan Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas, kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, kegiatan Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas, Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, Kegiatan Pengadaan Mebeleur, Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas, kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional, Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas, kegiatan pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor, Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah jabatan/dinas , kegiatan pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor, kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala mebeleur, kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas dan kegiatan Rehabilitasi

Sedang/Berat Gedung Kantor telah mencapai tingkat realisasi target Renja 100% dan Capaian target Renstra (periode 2019-2023) sampai tahun 2021 diperkirakan telah mencapai 60%.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur mencakup kegiatan Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu telah mencapai tingkat realisasi target Renja 0% dan Capaian target Renstra (periode 2019-2023) sampai tahun 2020 diperkirakan telah mencapai 20%.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan yang mencakup kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Kinerja SKPD, telah mencapai tingkat realisasi target Renja 0% dan Capaian target Renstra (periode 2019-2023) sampai tahun 2020 diperkirakan telah mencapai 20%.
5. Program Peningkatan Kerja Sama Antar Daerah mencakup kegiatan Musrenbang Perencanaan Pembangunan Daerah telah mencapai tingkat realisasi target Renja 0% dan Capaian target Renstra (periode 2019-2023) sampai tahun 2021 diperkirakan telah mencapai 40%.
6. Program Pembangunan Sarana/Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang mencakup kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan telah mencapai tingkat realisasi target Renja 29% dari target sebesar 20% dan Capaian target Renstra (periode 2019-2023) sampai tahun 2020 diperkirakan telah mencapai 29% dari target sebesar 20%. Realisasi capaian ini melebihi dari target yang ditetapkan disebabkan meningkatnya antusiasme masyarakat untuk terlibat dalam pelaksanaan kegiatan, hal ini menunjukkan bahwa pilihan jenis kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai kebutuhan dan keinginan masyarakat kelurahan dan pelaksana kegiatan memiliki kemampuan untuk melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan.
7. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang mencakup kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan, Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan telah mencapai tingkat realisasi target Renja 36% dari target sebesar 30% dan Capaian target Renstra (periode 2019-2023) sampai tahun 2021 diperkirakan telah mencapai 50% dari target sebesar 55%.

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun 2020 dan Pencapaian Rencana Strategis (Renstra) sampai dengan tahun 2021 untuk jelasnya dapat dilihat pada Tabel TC 29.

TABEL TC-29. REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

OPD : KECAMATAN TELLU LIMPOE

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOMES)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM (RENSTRA OPD) TAHUN 2023	REALISASI KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2019	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2020			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA OPD TAHUN 2021) TARGET APBD	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2021	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	CAT.
					TARGET RENJA OPD TAHUN 2020	REALISASI RENJA OPD TAHUN 2020	TINGKAT REALISASI (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11	12
	Non Program/Belanja Tidak Langsung										
	Gaji dan Tunjangan Pegawai	Pemberian Gaji dan Tunjangan PNS dan CPNS	70 Bulan	14	14	14	100	14	42	60	
	Tambahan Penghasilan	Pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNS dan CPNS	65 Bulan	13	13	13	100	13	39	60	
	Program/Belanja Langsung										
X XX 01	Program Administrasi Perkantoran	Cakupan administrasi perkantoran	100 %	20	20	20	100	20	60	60	
X XX 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen bermaterai yang diadakan	2,246 Lembar	406	900	712	79	730	1848	82	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOMES)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM (RENSTRA OPD) TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2019	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2020			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA OPD TAHUN 2021) TARGET APBD	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2021	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	CAT.
					TARGET RENJA OPD TAHUN 2020	REALISASI RENJA OPD TAHUN 2020	TINGKAT REALISASI (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11	12
X	XX 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 bulan	12	12	12	100	12	36	60	
X	XX 01 03	Penyediaan jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	60 bulan	12	12	12	100	12	36	60	
X	XX 01 05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	60 bulan	12	12	12	100	12	36	60	
X	XX 01 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	22 unit	22	22	22	100	22	66	60	
X	XX 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	60 bulan	12	12	12	100	12	36	60	
X	XX 01 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	60 bulan	12	12	12	100	12	36	60	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOMES)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM (RENSTRA OPD) TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2019	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2020			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA OPD TAHUN 2021) TARGET APBD	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2021	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	CAT.
					TARGET RENJA OPD TAHUN 2020	REALISASI RENJA OPD TAHUN 2020	TINGKAT REALISASI (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11	12
X XX 01	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	112 Kali	17	17	15	88	20	52	46	
X XX 01	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Kali 1,452	123	223	197	88	295	615	42	
X XX 01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Waktu pelayanan administrasi perkantoran	60 bulan	12	12	12	100	12	36	60	
X XX 02	Pogram Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	20	20	20	100	20	60	60	
X XX 02	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan jenis Kendaraan Dinas/Operasional yang diadakan	8 unit	0	1	0	0	1	1	13	
X XX 02	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah dan jenis perlengkapan rumah jabatan/dinas yang diadakan	5 unit	0	1	0	0	1	1	20	
X XX 02	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	53 unit	5	16	10	63	10	25	47	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOMES)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM (RENSTRA OPD) TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2019	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2020			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA OPD TAHUN 2021) TARGET APBD	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2021	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	CAT.
					TARGET RENJA OPD TAHUN 2020	REALISASI RENJA OPD TAHUN 2020	TINGKAT REALISASI (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11	12
X	08	Jumlah dan Jenis Peralatan rumah dinas diadakan	30 unit	0	1	0	0	5	5	17	
X	09	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	41 unit	6	17	17	100	10	33	80	
X	10	Jumlah dan jenis mebeleur yang diadakan	137 unit	0	38	38	100	39	77	11	
X	21	Jumlah dan jenis rumah dinas yang dipelihara secara berkala	1 unit	0	1	0	0	1	1	20	
X	22	Jumlah dan jenis gedung kantor yang dipelihara secara berkala	7 unit	1	5	5	100	7	13	37	
X	24	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipeliharaan secara berkala	8 unit	8	8	8	100	8	24	60	
X	25	Jumlah dan Jenis Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Yang dipelihara Rutin/Berkala	20 unit	0	4	0	0	4	4	4	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOMES)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM (RENSTRA OPD) TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2019	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2020			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA OPD TAHUN 2021) TARGET APBD	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2021	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	CAT.	
					TARGET RENJA OPD TAHUN 2020	REALISASI RENJA OPD TAHUN 2020	TINGKAT REALISASI (%)					
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11	12	
X XX	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perengkapan gedung Kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara secara berkala	20 unit	7	0	4	0	8	15	75
X XX	02	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah jabatan/dinas	Jumlah dan Jenis Peralatan Rumah jabatan/Dinas yang dipelihara rutin/berkala	20 unit	0	0	1	0	6	6	30
X XX	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung Kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara secara berkala	16 unit	0	0	14	9	3	12	75
X XX	02	29	Pemeliharaan Rutin/berkala mebeleur	Jumlah dan Jenis Peralatan Mebeleur Yang Dipelihara Rutin/Berkala	8 unit	0	0	1	0	3	3	38
X XX	02	41	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	Jumlah Luasan Rumah Dinas yang direhabilitasi Sedang/Berat	1 unit	0	0	1	0	1	1	100
X XX	02	42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor Yang di Rehabilitasi Sedang/Berat	8 unit	0	0	1	0	1	1	13

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOMES)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM (RENSTRA OPD) TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2019	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2020			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA OPD TAHUN 2021) TARGET APBD	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2021	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	CAT.
					TARGET RENJA OPD TAHUN 2020	REALISASI RENJA OPD TAHUN 2020	TINGKAT REALISASI (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11	12
X XX	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	100 %	0	20	0	0	20	20	20	
X XX	03	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	10 Stel	0	2	0	0	2	2	20	
X XX	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	100 %	0	20	0	0	20	20	20	
X XX	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Kinerja SKPD	7 laporan	0	7	0	0	6	6	17	
X XX	16	Program Peningkatan Kerja Sama Antar Daerah	100 %	0	20	20	100	20	40	40	
X XX	16	Kegiatan Musrenbang Perencanaan Pembangunan Daerah	300 Org	0	220	295	134	150	445	148	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOMES)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM (RENSTRA OPD) TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2019	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2020			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA OPD TAHUN 2021) TARGET APBD	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2021	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	CAT.
					TARGET RENJA OPD TAHUN 2020	REALISASI RENJA OPD TAHUN 2020	TINGKAT REALISASI (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11	12
1 20 XX 28	Program Pembangunan Sarana/Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat kelurahan dalam pembangunan	20 %	29	0	0	0	0	29	145	
1 20 XX 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	25 Org	690	0	0	0	0	690	2760	
1 20 XX 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	25 Org	4140	0	0	0	0	4140	16560	
1 20 XX 29	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat kelurahan dalam pembangunan	55 %	29	30	36	120	50	50	91	
1 20 XX 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan	6,388 Org	0	0	0	0	380	380	6	
1 20 XX 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	12,775 Org	0	1238	1473	119	380	1853	15	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOMES)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM (RENSTRA OPD) TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2019	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA OPD TAHUN 2021) TARGET APBD	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2021	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	CAT.	
					TARGET RENJA OPD TAHUN 2020	REALISASI RENJA OPD TAHUN 2020	TINGKAT REALISASI (%)					
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11	12	
1	20	29	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	21,300 Org	0	2947	119	950	3897	18

**PENYESUAIAN KE DALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
OPD : KECAMATAN TELLU LIMPOE**

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOMES)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM (RENSTRA OPD) TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2019	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA OPD TAHUN 2021) TARGET APBD	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA OPD S/D TAHUN BERJALAN 2021	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	CAT.	
					TARGET RENJA OPD TAHUN 2020	REALISASI RENJA OPD TAHUN 2020	TINGKAT REALISASI (%)					
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5 + 7 + 9)	11	12	
7	Unsur Kewilayahan											
7	01 Kecamatan											

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOMES)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM (RENSTRA OPD) TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2019	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2020			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA OPD TAHUN 2021) TARGET APBD	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2021	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	CAT.
					TARGET RENJA OPD TAHUN 2020	REALISASI RENJA OPD TAHUN 2020	TINGKAT REALISASI (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11	12
7 .01 .02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	0	0	0	0	33	33	33	
7 .01 .02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	0	0	0	0	33	33	33	
7 .01 .02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilaksanakan	6 Urusan	-	-	-	-	6	6	33	
7 .01 .02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan yang dilaksanakan	1 Urusan	-	-	-	-	1	1	33	
7 .01 .03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	55 %	29%	30	36%	120%	50%	50%	91	
7 .01 .03	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan	55 %	0	0	0	0	50	50	91	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOMES)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM (RENSTRA OPD) TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2019	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2020			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA OPD TAHUN 2021) TARGET APBD	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2021	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	CAT.
					TARGET RENJA OPD TAHUN 2020	REALISASI RENJA OPD TAHUN 2020	TINGKAT REALISASI (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11	12
7 .01 .03 .01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	3,280 Orang	-	-	-	-	2,985	2,985	91.01	
7 .01 .03 .02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	55 %	29	30	36	120	50	50	91	
7 .01 .03 .01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan	600 Orang	-	-	-	-	-	-		
7 .01 .03 .02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	6,388 Orang	-	1,238	1,474	119.06	2,030	3,504	82.28	
7 .01 .03 .03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	12,775 Orang	-	2,474	2,946	119.08	4,061	7,007	60.00	
7 .01 .03 .04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dievaluasi	12 Kel	-	-	-	-	0	0		
7 .01 .06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	0	0	0	0	33	33	33	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOMES)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM (RENSTRA OPD) TAHUN 2023	REALISASI KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2019	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2020			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA OPD TAHUN 2021) TARGET APBD	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2021	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	CAT.
					TARGET RENJA OPD TAHUN 2020	REALISASI RENJA OPD TAHUN 2020	TINGKAT REALISASI (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11	12
7 .01 .06 .2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	0	0	0	0	33	33	33	
7 .01 .06 .2.01	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang melakukan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa yang difasilitasi	6 Desa	0	-	-	-	6	6	33	
7 .01 .06 .2.01	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah desa yang melaksanakan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi	6 Desa	0	-	-	-	6	6	33	
7 .01 .06 .2.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Keterteraman dan Keterlibatan Umum	Jumlah desa yang menyelenggarakan keterteraman dan keterlibatan umum yang difasilitasi	6 Desa	0	-	-	-	6	6	33	
X XX 01	XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	88.88%	100%	100%	23.57%	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOMES)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM (RENSTRA OPD) TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2019	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2020			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA OPD TAHUN 2021) TARGET APBD	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2021	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	CAT.
					TARGET RENJA OPD TAHUN 2020	REALISASI RENJA OPD TAHUN 2020	TINGKAT REALISASI (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11	12
X XX 01	2.02	XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	60.00	
X XX 01	2.02 .01	XXX Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	70 Bulan	14	14	14	100.00	14	42	60.00	
X XX 01	2.02 .03	XXX Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Bulan	12	12	12	100.00	12	36	60.00	
X XX 01	2.06	XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	20	20	20	100	20	60	60	
X XX 01	2.06 .02	XXX Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	231 Unit	11	32	27	84.38	21	59	25.54	
X XX 01	2.06 .04	XXX Penyediaan Bahan Logistik Kantor	55,226 Unit	18,000	25,000	20,000	80.00	15,226	53,226	96.38	
X XX 01	2.06 .05	XXX Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	160,230 Lembar	25,000	30,000	25,000	83.33	35,230	85,230	53.19	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOMES)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM (RENSTRA OPD) TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2019	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2020			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA OPD TAHUN 2021) TARGET APBD	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2021	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	CAT.
					TARGET RENJA OPD TAHUN 2020	REALISASI RENJA OPD TAHUN 2020	TINGKAT REALISASI (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11	12
X XX 01	.08 2.06 XXX Fasilitas Kunjungan Tamu	3 Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	4 360 Kali	5 30	6 30	7 30	8=(7/6) 100.00	9 140	10=(5+7+9) 200	11 55.56	
X XX 01	.09 2.06 XXX Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	4 1,530 Kali	5 140	6 212	7 112	8=(7/6) 52.83	9 430	10=(5+7+9) 682	11 44.58	
X XX 01	2.07 XXX Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Cakupan Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 100%	5 20	6 20	7 20	8=(7/6) 100	9 20	10=(5+7+9) 60	11 6,000	
X XX 01	.05 2.07 XXX Pengadaan Mebel	3 Jumlah dan jenis mebel yang diadakan	4 397 Unit	5 -	6 39	7 38	8=(7/6) 97.44	9 127	10=(5+7+9) 165	11 41.56	
X XX 01	2.08 XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 100%	5 100%	6 20	7 20	8=(7/6) 20	9 100	10=(5+7+9) 20	11 60	
X XX 01	.01 2.08 XXX Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Jumlah dokumen bermaterai yang disediakan	4 2,246 Lembar	5 502	6 900	7 712	8=(7/6) 79.11	9 546	10=(5+7+9) 1,760	11 78.36	
X XX 01	.02 2.08 XXX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4 60 Bulan	5 12	6 12	7 12	8=(7/6) 100.00	9 12	10=(5+7+9) 36	11 60.00	
X XX 01	.04 2.08 XXX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3 Waktu pelayanan administrasi perkantoran	4 60 Bulan	5 12	6 12	7 12	8=(7/6) 100.00	9 12	10=(5+7+9) 36	11 60.00	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOMES)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM (RENSTRA OPD) TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2019	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2020			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA OPD TAHUN 2021) TARGET APBD	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2021	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	CAT.
					TARGET RENJA OPD TAHUN 2020	REALISASI RENJA OPD TAHUN 2020	TINGKAT REALISASI (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11	12
X	XX 01 2.09	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	20	20	20	100	20	60	60	
X	XX 01 2.09 .01	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan	65 Unit	21	21	21	100.00	21	63	19.38	
X	XX 01 2.09 .05	Jumlah dan Jenis Mebel yang disediakan jasa Pemeliharaan	6 Unit	-	-	-	-	0	-	-	
X	XX 01 2.09 .06	Jumlah dan jenis peralatan dan mesin yang disediakan jasa pemeliharaan	31 Unit	3	18	9	50.00	3	15	9.68	
X	XX 01 2.09 .09	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	15 Unit	7	7	5	71.43	5	17	22.67	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Secara kelembagaan, Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang berfungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dan melaksanakan tugas pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Daerah di Kecamatan.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tellu Limpoe diukur berdasarkan pencapaian terhadap target capaian indikator kinerja pada renstra. Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Tellu Limpoe tahun 2020 yaitu; 1). Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai nilai 78 dari target yang ditetapkan pada Renstra yaitu 76 dan, 2). Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik mencapai nilai 100% dari target yang ditetapkan pada Renstra yaitu 100%, 3) Persentase kegiatan yang dikooordinasikan di kecamatan mencapai nilai 100% dari target yang ditetapkan pada Renstra yaitu 100%, dan 4) Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi mencapai nilai 100% dari target yang ditetapkan pada Renstra yaitu 100%. Untuk jelasnya, dapat dilihat pada Tabel TC 30.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai lebih dari target yang diharapkan disebabkan indicator yang di survey memiliki nilai rata-rata pelayanan di atas nilai harapan.

TABEL TC-30. PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

OPD : KECAMATAN TELLU LIMPOE

NO.	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RESTRA OPD					REALISASI CAPAIAN			PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			76	76	79,15	80,32	74.58	78	78.25	80.30			
2	Persentase layanan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik			100	100	100	100	100	100	100	100			
3	Persentase kegiatan yang dikooordinasikan di kecamatan			100	100	100	100	100	100	100	100			
4	Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi			100	100	100	100	100	100	100	100			

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Untuk mewujudkan isu-isu strategis dalam memproyeksi kondisi yang diharapkan kedepan dalam kaitannya dengan bidang tugas Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang dilakukan dengan mengimplementasikan metode analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunities dan Threats) isu tersebut akan memiliki arti fungsional apabila dibahas dalam kaitannya dengan kondisi realitas organisasi.

Isu penting yang berkaitan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah merupakan kenyataan yang menggambarkan keadaan atau realitas tentang sebuah pokok permasalahan agar memudahkan dalam mengorganisir isu maka dilakukan identifikasi.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tellu Limpoe bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

- a) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Sidenreng Rappang kepada camat di Bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayahnya. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan bupati kepada camat, maka camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Sidenreng Rappang;
- b) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c) Pelayanan prima, kantor kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan standar pelayanan

yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;

- d) Peningkatan kapasitas aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.
- e) Bencana non alam berupa pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) yang terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2020 dan 2021 berpotensi berlanjut hingga tahun 2022 sehingga dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan harus tetap mempertimbangkan upaya pencegahan penularan virus tersebut.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Program Prioritas Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja, pendanaan, dan prakiraan maju yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS.

Rencana Kerja Kecamatan Tellu Limpoe berdasarkan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah se Kabupaten Sidenreng Rappang yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Tellu Limpoe.

Tahun anggaran 2022 Kantor Kecamatan Tellu Limpoe merencanakan 4 (empat) program, yaitu :

1. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public
2. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
3. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
4. Program penunjang urusan pemerintahan daerah

Review terhadap rancangan awal RKPD perlu dilakukan untuk mengukur kesesuaian Rancangan Awal RKPD dengan analisis kebutuhan organisasi. Untuk lebih jelasnya mengenai review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel TC 31.

TABEL TC-31. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

OPD : KECAMATAN TELLU LIMPOE

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN N/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UNSUR KEWILAYAHAN											
KECAMATAN											
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Tellu Limpoe	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	6,000,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Tellu Limpoe	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	6,000,000	
1.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Tellu Limpoe	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	6,000,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Tellu Limpoe	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	6,000,000	
1.1.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Kec.Tellu Limpoe	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilaksanakan	3 Urusan	3,000,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Kec.Tellu Limpoe	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilaksanakan	3 Urusan	3,000,000	
1.1.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec.Tellu Limpoe	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan yang dilaksanakan	1 Urusan	3,000,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec.Tellu Limpoe	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan yang dilaksanakan	1 Urusan	3,000,000	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN N/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Tellu Limpoe	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	52%	1,095,331,900	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Tellu Limpoe	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	52%	1,095,331,900	
2.1.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Tellu Limpoe	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan	52%	3,000,000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Tellu Limpoe	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan	52%	3,000,000	
2.1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Tellu Limpoe	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	1,594 Orang	3,000,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Tellu Limpoe	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	1,594 Orang	3,000,000	
2.2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec. Tellu Limpoe	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	52%	1,092,331,900	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec. Tellu Limpoe	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	52%	1,092,331,900	
2.2.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan di Kelurahan	Kel. Amparita, Kel. Arateng, Kel. T. Pulu, Kel. Baula, Kel. Pajalele, Kel. Massepe	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan	300 Orang	9,500,000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kel. Amparita, Kel. Arateng, Kel. T. Pulu, Kel. Baula, Kel. Pajalele, Kel. Massepe	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan	300 Orang	9,500,000	
2.2.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Amparita, Kel. Arateng, Kel. T. Pulu, Kel. Baula, Kel. Pajalele, Kel. Massepe	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan sarana prasarana kelurahan	2,115 Orang	565,343,900	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Amparita, Kel. Arateng, Kel. T. Pulu, Kel. Baula, Kel. Pajalele, Kel. Massepe	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	2,115 Orang	565,343,900	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN N/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Amparita, Kel. Arateng, Kel. T.Pulu, Kel. Baula, Kel. Pajalele, Kel. Masepe	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	4,229 Orang	514,488,000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Amparita, Kel. Arateng, Kel. T.Pulu, Kel. Baula, Kel. Pajalele, Kel. Masepe	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	4,229 Orang	514,488,000	
2.2.4	Evaluasi Kelurahan	Kec. Tellu Limpoe	Jumlah kelurahan yang dievaluasi	6 Kel	3,000,000	Evaluasi Kelurahan	Kec. Tellu Limpoe	Jumlah kelurahan yang dievaluasi	6 Kel	3,000,000	
3.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Kec. Tellu Limpoe	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	9,000,000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Kec. Tellu Limpoe	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	9,000,000	
3.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Kec. Tellu Limpoe	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	9,000,000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Kec. Tellu Limpoe	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	9,000,000	
3.1.1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Tellu Limpoe	Jumlah desa yang melakukan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa yang difasilitasi	3 Desa	3,000,000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Tellu Limpoe	Jumlah desa yang melakukan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa yang difasilitasi	3 Desa	3,000,000	
3.1.2	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kec. Tellu Limpoe	Jumlah desa yang melaksanakan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi	3 Desa	3,000,000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kec. Tellu Limpoe	Jumlah desa yang melaksanakan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi	3 Desa	3,000,000	

NO.	RANCANGAN AWAL RPKD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN N/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.1.3	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Tellu Limpoe	Jumlah desa yang menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	3 Desa	3,000,000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Tellu Limpoe	Jumlah desa yang menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	3 Desa	3,000,000	
4.	XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Tellu Limpoe	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	4,350,718,810	XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Tellu Limpoe	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	4,350,718,810	
4.1	XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Tellu Limpoe	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	3,545,607,810	XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Tellu Limpoe	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	3,545,607,810	
4.1.1	XXX Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Tellu Limpoe	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	3,527,607,810	XXX Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Tellu Limpoe	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	3,527,607,810	
4.1.2	XXX Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Tellu Limpoe	Waktu Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	18,000,000	XXX Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Tellu Limpoe	Waktu Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	18,000,000	
4.2.	XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Tellu Limpoe	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	346,918,000	XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Tellu Limpoe	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	346,918,000	
4.2.1	XXX Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Tellu Limpoe	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	24 Unit	89,700,000	XXX Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Tellu Limpoe	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	24 Unit	89,700,000	
4.2.2	XXX Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Tellu Limpoe	Jumlah dan jenis bahan logistik kantor yang disediakan	17,500 Unit	98,132,000	XXX Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Tellu Limpoe	Jumlah dan jenis bahan logistik kantor yang disediakan	17,500 Unit	98,132,000	

NO.	RANCANGAN AWAL RPKD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN N/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.2.3	XXX Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Tellu Limpoe	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan kantor yang disediakan	56,200 Lembar	30,586,000	XXX Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Tellu Limpoe	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan kantor yang disediakan	56,200 Lembar	30,586,000	
4.2.4	XXX Fasilitas Kunjungan Tamu	Kec. Tellu Limpoe	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	76 Kali	19,000,000	XXX Fasilitas Kunjungan Tamu	Kec. Tellu Limpoe	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	76 Kali	19,000,000	
4.2.5	XXX Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Tellu Limpoe	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	481 Kali	109,500,000	XXX Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Tellu Limpoe	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	481 Kali	109,500,000	
4.3	XXX Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Tellu Limpoe	Cakupan Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	34,793,000	XXX Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Tellu Limpoe	Cakupan Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	34,793,000	
4.3.1	XXX Pengadaan Mebel	Kec. Tellu Limpoe	Jumlah dan jenis mebel yang diadakan	55 Unit	34,793,000	XXX Pengadaan Mebel	Kec. Tellu Limpoe	Jumlah dan jenis mebel yang diadakan	55 Unit	34,793,000	
4.4	XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Tellu Limpoe	Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	254,204,000	XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Tellu Limpoe	Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	254,204,000	
4.4.1	XXX Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Tellu Limpoe	Jumlah dokumen bermaterai yang disediakan	550 Lembar	5,500,000	XXX Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Tellu Limpoe	Jumlah dokumen bermaterai yang disediakan	550 Lembar	5,500,000	
4.4.2	XXX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Tellu Limpoe	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	56,704,000	XXX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Tellu Limpoe	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	56,704,000	
4.4.3	XXX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Tellu Limpoe	Waktu pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	192,000,000	XXX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Tellu Limpoe	Waktu pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	192,000,000	

NO.	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN N/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.5	XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Tellu Limpoe	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	169,196,000	XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Tellu Limpoe	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	169,196,000	
4.5.1	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Tellu Limpoe	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan	22 Unit	50,196,000	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Tellu Limpoe	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan	22 Unit	50,196,000	
4.5.3	XXX Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Tellu Limpoe	Jumlah dan jenis peralatan dan mesin yang disediakan jasa pemeliharaan	13 Unit	3,000,000	XXX Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Tellu Limpoe	Jumlah dan jenis peralatan dan mesin yang disediakan jasa pemeliharaan	13 Unit	3,000,000	
4.5.4	XXX Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Tellu Limpoe	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	7 Unit	116,000,000	XXX Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Tellu Limpoe	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	7 Unit	116,000,000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Tellu Limpoe pada tahun perencanaan 2022 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada :

- a. Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan;
- b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
- c. Meningkatnya produktivitas sector-sektor perekonomian daerah;
- d. Menurunnya tingkat kemiskinan;
- e. Menurunnya ketimpangan distribusi pendapatan;
- f. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur daerah yang berkualitas;
- g. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
- h. Meningkatnya pertumbuhan investasi dan daya saing daerah;
- i. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah;
- j. Meningkatnya kualitas pelayanan public;
- k. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik;
- l. Terwujudnya desa maju dan mandiri;
- m. Meningkatnya kenyamanan kehidupan bermasyarakat.

Telaah usulan program dan kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan visi misi Kabupaten Sidenreng Rappang maka semua hal tersebut di atas perlu dilaksanakan dan dicapai oleh pengemban delegasi. Dan sehubungan bahwa Kecamatan Tellu Limpoe bukanlah Perangkat Daerah pengemban delegasi yang menangani teknis pelaksana usulan masyarakat maka dalam Renja Kecamatan Tellu Limpoe ini tidak terdapat usulan masyarakat. Untuk lebih jelasnya mengenai penelaahan usulan program, kegiatan dan sub kegiatan masyarakat dapat dilihat pada Tabel TC 32.

**TABEL TC-32. USULAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DARI
PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2022**

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
NIHIL					

BAB III.

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan Nasional Lima Tahun (jangka menengah) merupakan bentuk kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, kemudian dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dalam pelaksanaannya dilakukan dua tahapan yaitu, APBD awal dan APBD perubahan. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah harus selalu mengacu pada Program dan Kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi.

Visi RPJM tahun 2020 – 2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong” dengan Misi:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing.
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan.
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa.
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya.
7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga.
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya.
9. Sinergitas Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Pembangunan daerah pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD). Pembangunan Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan tingkat provinsi dan tingkat nasional.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Tellu Limpoe

a. Tujuan

Untuk mencapai misi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang maka Kantor Kecamatan Tellu Limpoe menetapkan tujuan yaitu :

1. Meningkatkan kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan

b. Sasaran

Dalam rangka untuk mencapai tujuan seperti tersebut diatas, maka ditetapkan sasaran strategis yang akan ditempuh yaitu :

1. Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan umum
 2. Meningkatnya kualitas layanan urusan koordinasi
 3. Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan
- c. Indikator Sasaran Rencana Kerja
- Adapun indikator sasaran dan target kinerja tahun 2022 dari Rencana Kerja Kecamatan Tellu Limpoe yaitu:
1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target kinerja yaitu nilai 80,32.
 2. Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik dengan target kinerja nilai 100%.
 3. Persentase kegiatan yang dikooordinasikan di kecamatan dengan baik dengan target kinerja nilai 100%.
 4. Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi dengan baik dengan target kinerja nilai 100%.

Selanjutnya tujuan dan sasaran Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang beserta indikator kinerjanya disajikan pada table 1 berikut ini:

Tabel 1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang

Bidang Urusan/ Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Formulasi Indikator	Target Kinerja 2022
Unsur Kewilayahan			
Tujuan; Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	$\frac{\text{Total dari nilai persepsi}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$	80,32
Sasaran 1; Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan umum	Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik	$\frac{\text{Jumlah urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik}}{\text{Jumlah urusan pemerintahan umum}} \times 100 \%$	100%
Sasaran 2; Meningkatnya kualitas layanan urusan koordinasi	Persentase kegiatan yang dikooordinasikan di kecamatan	$\frac{\text{Jumlah kegiatan yang dikooordinasikan}}{\text{Jumlah kegiatan}} \times 100 \%$	100%
Sasaran 3; Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan	Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi	$\frac{\text{Jumlah Desa yang dibina dan diawasi}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100 \%$	100%

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan dilakukan untuk mencapai sasaran kinerja Kecamatan Tellu Limpoe dimana pada tahun 2022 menargetkan peningkatan kualitas layanan dengan indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan nilai 80,32 persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik dengan nilai 100%, persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan dengan baik dengan nilai 100%, dan persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi dengan baik dengan nilai 100%.

Perencanaan program tahun 2022 terbagi atas dua kategori yaitu program yang berhubungan langsung dengan pencapaian sasaran dan program yang sifatnya penunjang pencapaian sasaran strategis. Pengelompokan program tersebut sebagai berikut:

- a. Program pencapaian sasaran strategis
 1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 3. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- b. Program penunjang pencapaian sasaran strategis
 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Rumusan rencana program, kegiatan dan Sub kegiatan Kantor Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 untuk jelasnya dapat dilihat pada Tabel TC 33 sedangkan uraian per unit organisasi dapat dilihat pada Lampiran 1.

TABEL TC-33. RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

OPD : KECAMATAN TELLU LIMPOE

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOMES)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
7	Unsur Kewilayahan Kecamatan									
7	01									
7	.01	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Tellu Limpoe	100%	6,000,000	DAU		100%	70,700,000	
7	.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Tellu Limpoe	100%	6,000,000	DAU		100%	70,700,000	
7	.01	.02		3 Urusan	3,000,000	DAU		3 Urusan	43,800,000	
7	.01	.02		1 Urusan	3,000,000	DAU		1 urusan	26,900,000	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOMES)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	Kec. Tellu Limpoe	52%	1,095,331,900	DAU		55%	1,271,672,000	
7.01.03.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan	Kec. Tellu Limpoe	52%	3,000,000	DAU		55%	6,060,000	
7.01.03.01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	Kec. Tellu Limpoe	1,594 Orang	3,000,000	DAU		1.686 Orang	6,060,000	
7.01.03.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	Kec. Tellu Limpoe	52%	1,092,331,900	DAU		55%	1,265,612,000	
7.01.03.02	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan	Kel. Amparita, Kel. Arateng, Kel. T. Pulu, Kel. Baula, Kel. Pajalele, Kel. Massepe	300 Orang	9,500,000	DAU		300 Orang	13,500,000	
7.01.03.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Kel. Amparita, Kel. Arateng, Kel. T. Pulu, Kel. Baula, Kel. Pajalele, Kel. Massepe	2,115 Orang	565,343,900	DAU		2.243 Orang	864,694,000	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOMES)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
7 .01 .03 .02 .03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Kel. Amparita, Kel. Arateng, Kel. T. Pulu, Kel. Baula, Kel. Pajalele, Kel. Massepe	4,229 Orang	514,488,000	DAU		4.485 Orang	375,298,000	
7 .01 .03 .02 .04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dievaluasi	Kec. Tellu Limpoe	6 Kel	3,000,000	DAU		6 Kel	12,120,000	
7 .01 .06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Kec. Tellu Limpoe	100%	9,000,000	DAU		100%	70,700,000	
7 .01 .06 .2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Kec. Tellu Limpoe	100%	9,000,000	DAU		100%	70,700,000	
7 .01 .06 .2.01 .03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang melakukan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa yang difasilitasi	Kec. Tellu Limpoe	3 Desa	3,000,000	DAU		3 desa	29,000,000	
7 .01 .06 .2.01 .07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah desa yang melaksanakan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi	Kec. Tellu Limpoe	3 Desa	3,000,000	DAU		3 desa	23,500,000	
7 .01 .06 .2.01 .11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa yang menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	Kec. Tellu Limpoe	3 Desa	3,000,000	DAU		3 desa	18,200,000	
X	X	X								

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOMES)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	LOKASI	RENCANA TAHUN 2022			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		
				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	XX	XX							
X	XX 01	XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Tellu Limpoe	100%	4,350,718,810	DAU		100%	4,399,440,000
X	XX 01 2.02	XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Tellu Limpoe	100%	3,545,607,810	DAU		100%	3,558,809,000
X	XX 01 2.02 .01	XXX Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Tellu Limpoe	14 Bulan	3,527,607,810	DAU		14 Bulan	3,546,809,000
X	XX 01 2.02 .03	XXX Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Tellu Limpoe	12 Bulan	18,000,000	DAU		12 Bulan	12,000,000
X	XX 01 2.06	XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Tellu Limpoe	100%	346,918,000	DAU		100%	381,994,000
X	XX 01 2.06 .02	XXX Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Tellu Limpoe	24 Unit	89,700,000	DAU		73 unit	127,556,000
X	XX 01 2.06 .04	XXX Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Tellu Limpoe	17,500 Unit	98,132,000	DAU		71.910 unit	94,392,000
X	XX 01 2.06 .05	XXX Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Tellu Limpoe	56,200 Lembar	30,586,000	DAU		49.000 Lembar	26,300,000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOMES)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	LOKASI	RENCANA TAHUN 2022			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		
				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	XX 01 2.06 .08	XXX Fasilitas Kunjungan Tamu	Kec. Tellu Limpoe	76 Kali	19,000,000	DAU		85 Kali	23,746,000
X	XX 01 2.06 .09	XXX Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Tellu Limpoe	481 Kali	109,500,000	DAU		486 Kali	110,000,000
X	XX 01 2.07	XXX Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Tellu Limpoe	100%	34,793,000	DAU		100%	74,152,000
X	XX 01 2.07 .05	XXX Pengadaan Mebel	Kec. Tellu Limpoe	55 Unit	34,793,000	DAU		85 unit	74,152,000
X	XX 01 2.08	XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Tellu Limpoe	100%	254,204,000	DAU		100%	282,944,000
X	XX 01 2.08 .01	XXX Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Tellu Limpoe	550 Lembar	5,500,000	DAU		790 Lembar	7,900,000
X	XX 01 2.08 .02	XXX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Tellu Limpoe	12 Bulan	56,704,000	DAU		12 Bulan	54,884,000
X	XX 01 2.08 .04	XXX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Tellu Limpoe	12 Bulan	192,000,000	DAU		12 Bulan	220,160,000
X	XX 01 2.09	XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Tellu Limpoe	100%	169,196,000	DAU		100%	101,541,000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOMES)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
X	XX 01 2.09 .01	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan	Kec. Tellu Limpoe	22 Unit	50,196,000	DAU	22 Unit	53,927,000	
X	XX 01 2.09 .06	XXX Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan jenis peralatan dan mesin yang disediakan jasa pemeliharaan	Kec. Tellu Limpoe	13 Unit	3,000,000	DAU	8 unit	3,900,000	
X	XX 01 2.09 .09	XXX Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	Kec. Tellu Limpoe	7 Unit	116,000,000	DAU	5 unit	43,714,000	
J U M L A H						5,461,050,710			5,812,512,000	

4.2. Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Tellu Limpoe Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tebel 2. Indikator Program dan Kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang.

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
1.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
1.1.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilaksanakan
1.1.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan yang dilaksanakan
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan
2.1.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan
2.1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa
2.2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan
2.2.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan
2.2.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan sarana dan prasarana kelurahan
2.2.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan
2.2.4	Evaluasi Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dievaluasi
3.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
3.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
3.1.1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang melakukan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa yang difasilitasi

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
3.1.2	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah desa yang melaksanakan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi
3.1.3	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa yang menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum yang difasilitasi
4.	XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran
4.1	XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4.1.1	XXX Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4.1.2	XXX Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Waktu Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
4.2.	XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah
4.2.1	XXX Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
4.2.2	XXX Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan jenis bahan logistik kantor yang disediakan
4.2.3	XXX Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetak dan penggandaan kantor yang disediakan
4.2.4	XXX Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi
4.2.5	XXX Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
4.3	XXX Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4.3.1	XXX Pengadaan Mebel	Jumlah dan jenis mebel yang diadakan
4.4	XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.4.1	XXX Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen bermaterai yang disediakan
4.4.2	XXX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.4.3	XXX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu pelayanan administrasi perkantoran
4.5	XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.5.1	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan
4.5.2	XXX Pemeliharaan Mebel	Jumlah dan Jenis Mebel yang disediakan jasa Pemeliharaan
4.5.3	XXX Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan jenis peralatan dan mesin yang disediakan jasa pemeliharaan

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
4.5.4	XXX Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara

Selanjutnya Pengukuran Indikator Sasaran/ Kinerja Program (Outcome) Kecamatan Tellu Limpoe disajikan pada table 3 berikut ini:
Tabel 3. Formulasi Pengukuran Indikator Sasaran/ Kinerja Program (Outcome) Kecamatan Tellu Limpoe

No.	Program	Indikator Kinerja	Formulasi Indikator	Target Kinerja Kinerja 2022
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	$\frac{\text{Jumlah Urusan Pelayanan Publik yang diselenggarakan}}{\text{Jumlah Urusan Pelayanan Publik}} \times 100\%$	100%
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	$\frac{\text{Jumlah Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan}}{\text{Jumlah Masyarakat Desa dan Kelurahan Produktif}} \times 100\%$	52%
3.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	$\frac{\text{Jumlah Desa yang dibina dan diawasi}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100\%$	100%
4.	XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	$\frac{\text{Jumlah Layanan Administrasi yang diselenggarakan}}{\text{Jumlah Layanan Administrasi}} \times 100\%$	100%

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kabupaten Sidenreng Rappang untuk tahun 2022, dengan memperhatikan tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tellu Limpoe Tahun 2022 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Tellu Limpoe dan merupakan acuan bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan dan catatan sebagai berikut :

1. Kecamatan Tellu Limpoe sebagai koordinator (fasilitator) wilayah berkewajiban untuk melaksanakan program-program Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai satuan kerja lintas sektor dengan sebaik-baiknya;
2. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tellu Limpoe merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Tellu Limpoe;
3. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tellu Limpoe merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan Kecamatan Tellu Limpoe;
4. Kecamatan Tellu Limpoe berkewajiban menjaga konsistensi antara Rencana Kerja dengan Rencana Strategis Kecamatan Tellu Limpoe Tahun 2018-2023 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023.

Semoga dengan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tellu Limpoe ini dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang.

LAMPIRAN RENJA
TAHUN 2022
KECAMATAN TELLU LIMPOE

LAMPIRAN 1. RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

OPD : KECAMATAN TELLU LIMPOE

Lembar : 1 Dari 5

Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ SUB KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KECAMATAN		KEL. AMPARITA		KEL. ARATENG		KEL. TODDANG PULU		KEL. BAULA		KEL. PAJALELE		KEL. MASSEPPE		JUMLAH	
			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7.01	KECAMATAN		3,833,107,810	268,495,000		280,889,000		248,998,900		232,682,000		299,565,000		297,313,000		5,461,090,710		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	CAKUPAN	100%	6,000,000	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	6,000,000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	6,000,000	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	6,000,000
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilaksanakan	3 Urusan	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 Urusan	3,000,000
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan yang dilaksanakan	1 urusan	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 urusan	3,000,000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN DALAM KEGIATAN PEMBERDAYAAN	52%	6,000,000	52%	144,635,000	52%	191,529,000	52%	175,609,900	52%	152,880,000	52%	207,725,000	52%	216,953,000	52%	1,095,331,900
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan	52%	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52%	3,000,000
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	1.594 Orang	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.594 Orang	3,000,000

OPD : KECAMATAN TELLU LIMPOE

Lembar : 2 Dari 5

Kode	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KECAMATAN		KEL. AMPARITA		KEL. ARATENG		KEL. TODDANG PULU		KEL. BAULA		KEL. PAJALELE		KEL. MASSEPE		JUMLAH	
			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	52%	3.000.000	52%	144.635.000	52%	191.529.000	52%	175.609.900	52%	152.880.000	52%	207.725.000	52%	216.953.000	52%	1.092.331.900
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan	0	-	50 Orang	1.500.000	50 Orang	2.000.000	50 Orang	1.500.000	50 Orang	1.500.000	50 Orang	1.500.000	50 Orang	1.500.000	300 Orang	9.500.000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	0	-	474 Orang	58.465.000	273 Orang	90.939.000	480 Orang	114.159.900	357 Orang	106.950.000	335 Orang	91.715.000	196 Orang	103.115.000	2.115 Orang	565.343.900
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	0	-	948 Orang	84.670.000	547 Orang	98.590.000	960 Orang	59.950.000	713 Orang	44.430.000	670 Orang	114.510.000	391 Orang	112.338.000	4.229 Orang	514.488.000
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dievaluasi	6 Kel	3.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	6 Kel	3.000.000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	CAKUPAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100%	9.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	9.000.000

OPD : KECAMATAN TELLU LIMPOE

Lembar : 3 Dari 5

Kode	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KECAMATAN		KEL_AMPARITA		KEL_ARATENG		KEL_TODDANG PULU		KEL_BAULIA		KEL_PAJALELE		KEL_MASSEPE		JUMLAH	
			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	9,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	9,000,000
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang melakukan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa yang difasilitasi	3 desa	3,000,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 desa	3,000,000
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah desa yang melaksanakan tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi	3 desa	3,000,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 desa	3,000,000
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Keteriban Umum	Jumlah desa yang menyelenggarakan ketentraman dan keteriban umum yang difasilitasi	3 desa	3,000,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 desa	3,000,000
X.XX.01	XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN LAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	100%	3,812,107,810	100%	123,860,000	100%	89,360,000	100%	73,389,000	100%	79,802,000	100%	91,840,000	100%	80,360,000	100%	4,350,718,810
X.XX.01.2.02	XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	3,545,607,810	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	3,545,607,810
X.XX.01.2.02.01	XXX Penyelenggaraan Gaji dan Tunjangan ASN	XXX Penyelenggaraan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	3,527,607,810	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 bulan	3,527,607,810
X.XX.01.2.02.03	XXX Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Waktu Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	18,000,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	12 bulan	18,000,000

OPD : KECAMATAN TELLU LIMPOE
: 4.Dari 5

Kode	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KECAMATAN		KEL. AMPARITA		KEL. ARATENG		KEL. TODDANG PULU		KEL. BAULA		KEL. PAJALELE		KEL. MASSEPE		JUMLAH	
			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
X.XX.01.2.06	XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	178,000,000	100%	21,900,000	100%	42,400,000	100%	31,521,000	100%	23,997,000	100%	21,300,000	100%	27,800,000	100%	346,918,000
X.XX.01.2.06.02	XXX Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Unit	32,000,000	2 unit	2,000,000	3 unit	23,400,000	7 Unit	12,800,000	4 Unit	7,000,000	1 Unit	3,500,000	3 Unit	9,000,000	24 unit	89,700,000
X.XX.01.2.06.04	XXX Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan jenis bahan logistik kantor yang disediakan	6,000 Unit	40,000,000	2,500 Unit	10,900,000	2,000 unit	10,000,000	2,000 Unit	10,000,000	2,000 Unit	8,232,000	1,500 Unit	10,000,000	1,500 Unit	9,000,000	17,500 unit	98,132,000
X.XX.01.2.06.05	XXX Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan kantor yang disediakan	20,200 Lembar	10,000,000	7,000 Lembar	3,000,000	7,000 Lembar	3,000,000	7,000 Lembar	3,721,000	5,000 Lembar	3,265,000	5,000 Lembar	3,800,000	5,000 Lembar	3,800,000	56,200 Lembar	30,586,000
X.XX.01.2.06.08	XXX Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	20 Kali	10,000,000	12 Kali	2,000,000	12 Kali	2,000,000	8 Kali	1,000,000	8 Kali	1,000,000	8 Kali	1,000,000	12 Kali	2,000,000	80 Kali	19,000,000
X.XX.01.2.06.09	XXX Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	200 Kali	86,000,000	50 kali	4,000,000	50 kali	4,000,000	48 kali	4,000,000	48 Kali	4,500,000	35 kali	3,000,000	50 Kali	4,000,000	481 kali	109,500,000
X.XX.01.2.07	XXX Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	100%	7,000,000	100%	7,200,000	100%	3,000,000	100%	7,593,000	100%	3,000,000	100%	7,000,000	100%	34,793,000
X.XX.01.2.07.05	XXX Pengadaan Mebel	Jumlah dan jenis mebel yang diadakan	0	0	2 unit	7,000,000	1 unit	7,200,000	20 Unit	3,000,000	20 Unit	7,593,000	10 Unit	3,000,000	2 unit	7,000,000	55 unit	34,793,000
X.XX.01.2.08	XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	45,000,000	100%	39,060,000	100%	31,760,000	100%	32,616,000	100%	37,260,000	100%	32,448,000	100%	36,060,000	100%	254,204,000
X.XX.01.2.08.01	XXX Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen bermaterai yang disediakan	200 lbr	2,000,000	60 lbr	600,000	50 lbr	500,000	60 Lbr	600,000	60 Lbr	600,000	60 Lbr	600,000	60 lbr	600,000	550 Lembar	5,500,000
X.XX.01.2.08.02	XXX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	13,000,000	12 bulan	8,460,000	12 bulan	7,260,000	12 Bulan	8,016,000	12 Bulan	6,660,000	12 Bulan	7,848,000	12 bulan	5,460,000	12 bulan	56,704,000

OPD : KECAMATAN TELLU LIMPOE
Lembar : 5 Dari 5

Kode	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KECAMATAN		KEL. AMPARITA		KEL. ARATENG		KEL. TODDANG PULU		KEL. BAULA		KEL. PAJALELE		KEL. MASSEPE		JUMLAH	
			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
X.XX.01.2.08.04	XXX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	30,000,000	12 bulan	30,000,000	12 bulan	24,000,000	12 Bulan	24,000,000	12 Bulan	30,000,000	12 bulan	24,000,000	12 bulan	30,000,000	12 Bulan	192,000,000
X.XX.01.2.09	XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	43,500,000	100%	55,900,000	100%	8,000,000	100%	6,252,000	100%	10,952,000	100%	35,092,000	100%	9,500,000	100%	169,196,000
X.XX.01.2.09.01	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan	2 unit	20,000,000	4 unit	5,400,000	3 unit	5,000,000	3 Unit	4,252,000	3 Unit	5,952,000	4	4,592,000	3 unit	5,000,000	22 Unit	50,196,000
X.XX.01.2.09.06	XXX Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan jenis peralatan dan mesin yang disediakan jasa pemeliharaan	5 Unit	1,000,000	2 unit	500,000	0	-	2 Unit	500,000	0	-	2	500,000	2 unit	500,000	13 unit	3,000,000
X.XX.01.2.09.09	XXX Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1 unit	22,500,000	1 unit	50,000,000	1 unit	3,000,000	1 unit	1,500,000	1 unit	5,000,000	1 unit	30,000,000	1 unit	4,000,000	7 Unit	116,000,000